

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dibawah ini beberapa review hasil-hasil penelitian sebelumnya:

Penelitian pertama Welvin I Guna dan Arleen Herawaty dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba” dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 12, No. 1, April 2010. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2008. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dimana perusahaan yang dipilih sesuai dengan kriteria. Jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 40 perusahaan dengan 120 data penelitian. Setelah uji *outlier* jumlah data yang digunakan sebanyak 106 data penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage, kualitas audit, dan probabilitas memiliki pengaruh pada praktik manajemen laba. Itu mengukur bahwa leverage, kualitas audit oleh ukuran perusahaan audit dan laba atau rugi yang dilaporkan oleh manajemen akan memotivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Keterbatasan dalam penelitian ini yang harus diperhatikan untuk penelitian sebelumnya, yaitu: (1) jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek hanya satu jenis industri saja, (2) periode penelitian hanya tiga tahun, (3) variabel independen yang digunakan hanya menjelaskan 8% dari variasi variable dependen.

Penelitian kedua Panca Wahyuningsih dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Instutisional dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba” dalam Fokus Ekonomi Vol.4 No.2 Desember 2009. Metode analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Penelitian ini merupakan data empiris dari Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 20 perusahaan

perbankan untuk periode tahun 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Besar pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan dari penelitian ini adalah: (1) penelitian ini hanya dilakukan pada sektor perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, (2) sampel yang diambil dari tahun 2004-2006 masih relatif kecil, (3) variabel yang digunakan pada penelitian ini masih jauh dari cukup, sehingga masih adanya penambahan variabel pada penelitian mendatang.

Penelitian ketiga R.Erdianto Setyo Wahyono dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia” dalam jurnal ilmu dan riset akuntansi vol.1 no.1 (2012). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian menggunakan analisis regresi sederhana dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba di perusahaan perbankan *go public* yang dideteksi dengan menggunakan model spesifik akrual dari Beaver dan Engel (1996). Hasil penelitian menandakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang dilakukan oleh perusahaan perbankan tidak efektif dalam mengurangi praktek manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* tidak bekerja secara efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan perbankan. Penelitian tersebut terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: (1) penelitian dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, (2) Indeks *Corporate Governance* yang digunakan kurang dapat mengukur secara komprehensif praktik *Corporate Governance* dalam perusahaan perbankan yang diobservasi, (3) penggunaan model untuk mendeteksi manajemen laba dalam penelitian ini mungkin belum mampu mendeteksi manajemen laba dengan baik,

(4) perlunya mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam menentukan *discretionary accrual* sehingga dapat melihat adanya manajemen laba dengan sudut pandang yang berbeda.

Penelitian keempat Dian Agustina dengan judul “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba” dalam jurnal akuntansi dan keuangan vol. 15, no. 1, Mei 2013. Sampel penelitian adalah 14 perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling*. data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semua komponen *good corporate governance* (ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *leverage* berpengaruh, *free cash flow* berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti perusahaan dengan *free cash flow* yang tinggi akan membatasi praktek manajemen laba. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: (1) populasi dan sampel yang dipilih dari perusahaan Textil yang ditentukan oleh peneliti dan tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan generalisasi pada seluruh perusahaan public yang terdaftar di BEI, (2) pengukuran variabel komite audit dan dewan komisaris dalam penelitian ini hanya menggunakan kuantitas keanggotaan. Selain itu, variabel independen hanya mampu menjelaskan 16,1% dari variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang belum diteliti.

Penelitian kelima Eka Sefiana dengan judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Telah *Go Public* Di BEI” pada tahun 2009. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan metode tersebut diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel independen terbukti tidak berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan *corporate*

*governance* masih terbilang baru di Indonesia jadi tujuannya belum secara efektif dapat dirasakan. Selain itu, penerapan GCG sudah mulai banyak diterapkan dalam dunia usaha namun pelaksanaannya masih belum dapat terpenuhi secara baik.

Penelitian keenam Sylvia Veronica Siregar dan Sidharta Utama dengan judul “*Type Of Earnings Management And The Effect Of Ownership Structure, Firm Size, And Corporate Governance Practices: Evidence From Indonesia*” dalam *the internasional journal of accounting* vol.43, issue 1, Maret 2008. Penelitian menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan pada jenis manajemen laba yang dipilih. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan keluarga dan kelompok non-bisnis yang tinggi lebih cenderung memilih manajemen laba yang efisien daripada jenis perusahaan lain.

Penelitian ketujuh Agnes W.Y.Lo, Raymond M.K.Wong, dan Michael Firth dengan judul “*Can Corporate Governance Deter Management From Manipulating Earnings? Evidence From Related-Party Sales Transactions In China*” dalam *journal of Corporate Finance* vol.16,issue 2, April 2010. Data penelitian adalah sampel dari 266 perusahaan yang terdaftar di bursa saham Shanghai yang mengungkapkan rasio laba kotor pada transaksi pihak terkait. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan adalah penting dalam menghalangi penggunaan harga transfer yang dimanipulasi dalam transaksi penjualan pihak terkait.

Penelitian kedelapan Qiao Liu dan Zhou (Joe) Lu dengan judul “*Corporate Governance And Earnings Management In The Chinese Listed Companies: A Tunneling Perspective*” dalam *Journal of Corporate Finance* vol.13, issue 5, Desember 2007. Peneliti mendokumentasikan perbedaan sistematis dalam manajemen laba di seluruh alam semesta perusahaan yang terdaftar di China selama 1999-2005, dan secara empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat tata kelola perusahaan yang lebih tinggi memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah. Temuan empiris ini, meskipun tidak dapat sepenuhnya

mengecualikan penjelasan lain, sangat menunjukkan bahwa konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan investor minoritas merupakan bagian signifikan dari manajemen laba perusahaan-perusahaan yang terdaftar di China.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. *Good Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dengan tujuan pengelolaan perusahaan. Organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

*Good corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992, yang didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholder.

Ada banyak definisi untuk *good corporate governance*, menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) pada tahun 2001 yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan sesuai Pasal 1 ayat (1), PerMen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN, disebutkan bahwa *good corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Effendi (2016: 3) menyatakan bahwa *corporate governance* yang dimuat dalam laporan (*Turnbull Report*) bulan April 1999 didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengolah risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Organisasi atau perusahaan wajib menerapkan praktik *good corporate governance*. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang mewajibkan setiap organisasi yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan-perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan untuk menerapkan praktik *good corporate governance* (KNKG, 2006: 2). KNKG menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim di suatu negara.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem dan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur pihak-pihak yang berkepentingan agar tercapainya tujuan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan.

Penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- 2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.

- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Ada 5 (lima) prinsip *corporate governance* yang biasa dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu (1) Transparansi (*transparency*), (2) Akuntabilitas (*accountability*), (3) Responsibilitas (*responsibility*), (4) Independensi (*independency*), dan (5) Kesetaraan (*fairness*). Kelima prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Transparansi

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material.
- b. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan, dan non-keuangan, serta audit.
- c. Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyajian dan penyajian laporan keuangan.
- d. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

#### 2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

### 3) Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

### 4) Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

### 5) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut:

- a. Di kelas manapun, semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak-hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.
- b. Suara harus disampaikan oleh para kustodian atau *hominoes* dengan cara yang disetujui oleh pemilik saham.
- c. Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya yang mahal untuk menyampaikan suara.

- d. Transaksi orang dalam (*insider trading*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang.
- e. Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau hak-hak yang berpengaruh terhadap perusahaan.

### **2.2.2. Komisaris Independen**

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing (KNKG, 2006: 12). Istilah independen pada komisaris independen tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa komisaris lainnya tidak independen. Namun, istilah komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor. Salah satu manfaat utama keberadaan direktur independen dan komisaris independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip kesetaraan (*fairness*). Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

### **2.2.3. Komite Audit**

Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris, sama seperti komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan *corporate governance*.

Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan

fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006: 15), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- 1) Pelaporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
- 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
- 4) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

#### **2.2.4. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005: 179). Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dengan keinginan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut membuat manajemen akan berusaha untuk mewujudkannya sehingga membuat risiko perusahaan semakin kecil di mata kreditur dan akhirnya kreditur hanya meminta return yang kecil.

#### **2.2.5. Manajemen Laba**

Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan

akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan *accrual* dalam menyusun laporan keuangan (Scott, 2006: 344). Manajemen laba menurut Schipper (1989) dapat didefinisi sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba dapat berupa kosmetik, jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapat terlihat nyata, jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba (Subramanyam dan Wild, 2010: 117).

Selanjutnya Subramanyam dan Wild (2010: 117) menyatakan terdapat tiga jenis strategi manajemen laba. (1) Manajer meningkatkan laba (*increasing income*) periode kini. (2) Manajer melakukan “mandi besar” (*big bath*) melalui pengurangan laba periode ini. (3) Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (*income smoothing*).

#### 1) Meningkatkan laba.

Meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Selain itu, perusahaan dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini sering kali dilaporkan “di bawah laba bersih” (*below the line*), sehingga dipandang terlalu relevan.

#### 2) *Big bath*

Melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan

manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi big bath juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

### 3) Perataan laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya.

Banyak alasan untuk melakukan manajemen laba, di antaranya meningkatkan laba dalam laporan keuangan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah.

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Subramanyam dan Wild (2010: 133) menyatakan ada 2 (dua) metode utama manajemen laba, yaitu:

- 1) Pemindahan laba, merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban.
- 2) Manajemen laba melalui klasifikasi

Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan beban dibawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh analis.

Sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analis harus memeriksa hal berikut:

- a) Insentif melakukan manajemen laba
- b) Reputasi dan masa lalu manajemen
- c) Pola yang konsisten
- d) Kesempatan melakukan manajemen laba

## **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba**

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan serta memberikan nasihat kepada manajemen (Ridlo dan Kurnia, 2016: 8).

Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu menciptakan perusahaan dengan tata kelola yang baik karena dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih terhadap manajer sehingga dapat mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh manajer. Jika perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan akan lebih berintegritas.

### **2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial juga diartikan sebagai kepemilikan saham dari pihak manajemen secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti dewan direksi dan komisaris (Mauliridiyah dan Farida, 2014). Adanya kepemilikan saham oleh manajemen yang berarti adanya kepentingan manajemen dalam pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya dapat mengatur laporan keuangan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari manajemen. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya.

### **2.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

Komite audit merupakan pihak internal perusahaan yang menjalankan tugasnya untuk melakukan control internal termasuk dalam hal pelaporan keuangan, manajemen kontrol dan resiko, memastikan perusahaan tunduk pada peraturan yang berlaku dan memantau agar perusahaan melakukan tata kelola

perusahaan yang baik (Effendi, 2016: 48). Keberadaan komite audit dalam menjalankan tugasnya membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris suatu perusahaan menjadi salah satu langkah yang efektif untuk menekan praktik manajemen laba.

Komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya harus memiliki sikap dan perilaku independen agar dapat memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

#### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang kebenarannya masih harus diuji (Martono, 2010: 57). Berikut adalah hipotesis dalam penelitian ini:

H<sub>1</sub> : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba

H<sub>2</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba

H<sub>3</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba

H<sub>4</sub> : Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba

#### 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

*Good corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Untuk lebih menyederhanakan pemikiran tersebut maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut dan juga menggambarkan apa saja yang termasuk dalam variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) :

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**



